

Temukan Komunikasi Mencurigakan

Dari Halaman 1

KPK sedang menelusuri kemungkinan adanya hubungan komunikasi antara Bobby dan salah satu tersangka utama dalam kasus ini, yakni Topan Obaja Putra Ginting, eks Kepala Dinas PUPR Sumut.

Topan sendiri dikenal sebagai orang dekat Bobby, yang memperkuat alasan penyidik untuk menelusuri hubungan keduanya lebih jauh.

"Semua bukti elektronik yang kami amankan tentu akan kami dalam informasinya," ujar Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu (2/7/2025).

Meski demikian, Budi belum dapat mengungkap secara rinci isi dari barang bukti tersebut karena masih masuk dalam materi penyidikan yang bersifat tertutup.

Informasi yang tersimpan dalam bukti elektronik itu disebut akan menjadi bagian penting dalam mengungkap pola komunikasi, alur pengaturan proyek, hingga siapa saja yang terlibat di balik layar.

Komis Pemberantasan Korupsi (KPK) lebih dulu melancarkan operasi tangkap tangan (OTT) di wilayah Sumatera Utara pada Kamis malam, 26 Juni 2025.

Usai OTT dilakukan, tim penyidik segera melakukan penggeledahan lanjutan di sejumlah lokasi penting guna mengamankan dokumen serta barang bukti pendukung lainnya.

Dari hasil penyelidikan, KPK menetapkan lima tersangka dalam dugaan suap proyek jalan yang melibatkan Dinas PUPR Sumut dan Satker PJN Wilayah I Sumut.

Nilai keseluruhan proyek yang diduga bermasalah tercatat mencapai Rp231,8 miliar, dengan estimasi suap mencapai Rp2 miliar.

Meski begitu, saat operasi tangkap tangan dilakukan, tim penyidik baru berhasil menyita uang tunai sebesar Rp231 juta yang diduga merupakan bagian dari komitmen fee.

Lima tersangka yang telah diumumkan pada Sabtu (28/6/2025) adalah:

1. Topan Obaja Putra Ginting, Kepala Dinas PUPR Sumut
2. Rasuli Efendi Siregar, Kepala UPTD Gunung Tua Dinas PUPR Sumut dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
3. Heliyanto, PPK Satker PJN Wilayah I Sumut
4. M. Akhirun Efendi Siregar, Direktur Utama PT Daya Nur Global (PT DNG)
5. M. Rayhan Dulasmil Pilang, Direktur PT Rukun Nusantara (PT RN)

Dalam perkara pertama, Topan, Rasuli, dan Akhirun diduga mengatur proyek pengadaan jalan Sipiongot-Batas Labuhanbatu Selatan dan Jalan Hutaimbaru-Sipiongot senilai Rp157,8 miliar.

PT DNG ditunjuk sebagai pelaksana proyek tanpa melalui prosedur resmi yang sah.

Sebagai imbalannya, Akhirun dan anaknya,

Rayhan, disebut memberikan uang kepada Topan dan Rasuli agar proyek tersebut bisa dijalankan sesuai skenario.

Sementara itu, dalam perkara kedua, Heliyanto diduga menerima suap Rp120 juta dari Akhirun dan Rayhan.

Uang itu diberikan sebagai balas jasa atas pengaturan katalog elektronik, sehingga PT DNG dan PT RN memenangkan sejumlah proyek sejak 2023 hingga 2025.

KPK menyatakan masih akan menelusuri proyek-proyek lain yang diduga bermasalah, termasuk potensi adanya keterlibatan pejabat tingkat tinggi lainnya di pemerintahan daerah.

Nama Bobby Nasution yang muncul dalam radar penyidik menandakan bahwa penyidikan kasus ini mulai menyentuh lingkaran kekuasaan yang lebih tinggi.

Meski belum ada penetapan status terhadap Bobby, penggalian jejak digital dan komunikasi intensif yang dilakukan KPK menunjukkan keseriusan lembaga antirasuah tersebut dalam membuka tabir dugaan korupsi di balik proyek infrastruktur jalan Sumatera Utara.

KPK juga menegaskan bahwa proses hukum akan terus berjalan dengan mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Sementara publik menanti perkembangan lebih lanjut, satu hal yang pasti, kasus ini mengingatkan kita bahwa pengawasan terhadap anggaran publik harus diperketat, terlebih saat menyangkut proyek dengan nilai ratusan miliar rupiah. (gel/js)

Pakar Pidana: Tidak Mungkin Gubernur

Dari Halaman 1

rah tidak tahu anggaran-anggaran yang menjadi pertanggungjawaban dia sebagai kepala daerah, itu kepada siapa dan bagaimana itu kan tidak mungkin," ucap Yenti.

Yenti menuturkan, di sejumlah daerah, pimpinan daerah mempunyai kedekatan langsung dengan PUPR karena anggaran terbesar ada di sana.

"Apalagi ini ada nepotisme ya, nepotisme itu tidak harus dengan anak saudara dan sebagainya, orangnya dibawa itu nepotism, nah nepotisme itu tidak akan lepas dari KKN, korupsi

kolusi nepotisme, nah ini yang terjadi memang seperti ini," ujar Yenti.

Oleh karena itu Yenti meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) jujur dalam mengungkap siapa saja pihak yang diduga terlibat korupsi pada proyek PUPR di Sumatera Utara. Pasalnya sebelum melakukan operasi tangkap tangan, KPK sesungguhnya sudah melakukan penyadapan sehingga tahu siapa saja pihak dalam puseuran korupsi proyek PUPR.

"Kalau OTT itu pasti sudah ada penyadapan, nah di penyadapan ini kita minta betul-betul kepada KPK itu untuk jujur deh, kita bisa melihat kok," kata Yenti.

Saatnya Publik Mengawal, Bukan Membisu

Dari Halaman 1

berhasilan para pelindung koruptor.

Dalam konteks OTT Topan Ginting, suar-suar skeptis bahwa pengusutan ini tak akan menyentuh tokoh utama sangat nyaring terdengar. Ada kekhawatiran bahwa kasus ini hanya akan berujung pada simbolisasi penegakan hukum, bukan penyelesaian struktural. Namun ketimbang bersikap pasrah, seharusnya suar-suar itu berubah menjadi tuntutan kritis yang sistematis dan berkelanjutan.

Media Diantara Etika Jurnalistik dan Godaan

Peran media tak bisa dinafikan. Wartawan bukan hanya peliput peristiwa, tetapi juga penjaga kewarasan mawgeri. Namun belakangan, di banyak kasus, media justru tampil sebagai penghalus citra kekuasaan. Di saat publik butuh informasi objektif, sejumlah media justru berlomba membuat narasi tandingan yang menyamarkan realitas. Pejabat yang disebut-sebut dalam puseuran kasus justru diberi panggung untuk membantah, menampilkan kesalahan, atau menunjukkan kepedulian sosial yang men-

dadak muncul setelah namanya tercium dalam skandal.

Inilah saatnya jurnalis kembali pada marwahnya: menggali, mendalami, dan mengungkap. Investigasi jurnalistik adalah alat demokrasi untuk membuka tabir kebohongan. Kasus ini bukan sekadar perkara hukum, tetapi momentum bagi media lokal dan nasional untuk menunjukkan keberpihakan pada kebenaran, bukan pada kuasa.

Menegakkan atau Menyelamatkan?

Harus diakui, tantangan terbesar KPK bukan hanya membongkar kejahatan korupsi, tapi juga melawan persepsi bahwa lembaga ini mulai kehilangan tarung. Publik tak butuh KPK yang tampil teatrikal di awal namun mengendap di tengah jalan. Yang dibutuhkan adalah penegakan hukum yang utuh, menyentuh akar, dan tak tunduk pada kekuatan politik manapun.

Jika ada dugaan kuat bahwa kebijakan atau perintah berasal dari tingkat pimpinan, maka KPK harus berani menelusuri jejaknya. Jangan ada tebang pilih. Jika tidak, maka yang terjadi bukan penegakan hukum, melainkan pengalihan isu.

Rakyat Harus Mengawal

KMP Tunu Pratama Jaya Pulang Tenggelam

Dari Halaman 1

berjumlah 30 orang. Sebanyak 21 di antaranya sudah diserahkan kembali ke keluarganya. Selain itu korban tewas dalam insiden ini bertambah jadi 6 orang.

"Survivor yang bisa diselamatkan ada 30 orang, dengan enam orang kondisi meninggal dunia," Kepala Kantor SAR Surabaya, Nanang Sigit, yang juga bertindak sebagai SAR Mission Coordinator, di Banyuwangi, Kamis (3/7). Nanang mengatakan, 21 korban yang

selamat saat ini sudah tiba di Posko Operasi SAR dan Potensi SAR Gabungan di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur, setelah sebelumnya diberangkatkan dari Posko Operasi SAR di Pelabuhan Gilimanuk, Bali.

"Untuk yang saat ini ditransfer dari Posko Gilimanuk ke Posko di Ketapang adalah 21 orang survivor dalam kondisi selamat," ucapnya.

Kondisi 21 orang itu dinyatakan sehat usai menjalani pemeriksaan. Beberapa di antaranya memang mengalami syok dan kelelahan. Tapi, tak ada hal fatal yang dialami mereka.

Hasto Kristiyanto Dituntut 7 Tahun

Dari Halaman 1

lama 7 tahun dan pidana denda sebesar Rp600 juta subsider 6 bulan kurungan," ujar Jaksa KPK Wawan Yunarwanto saat membacakan amar tuntutan pidana di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Kamis (3/7).

Dalam pertimbangannya, jaksa mengungkapkan sejumlah hal yang memberatkan dan meringankan.

Keadaan memberatkan adalah perbuatan terdakwa tidak mendukung pemberantasan tindak pidana korupsi dan terdakwa tidak mengakui

perbuatannya.

Sedangkan keadaan meringankan, terdakwa bersikap sopan dalam persidangan, mempunyai tanggungan keluarga dan tidak pernah dihukum. Hasto disebut terbukti merintangi penanganan perkara Harun Masiku yang merupakan mantan calon legislatif PDIP.

Hasto disebut menghalangi penyidik KPK menangkap Harun Masiku yang sudah buron sejak tahun 2020 lalu.

Selain itu, Hasto juga dinilai terbukti menyuap mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan 57.350 dolar Singapura atau setara dengan Rp600 juta.

Suap diberikan agar Wahyu yang sempat men-

Pembangunan Fisik Gedung Masif,

Dari Halaman 1

Sebaliknya, SIPP yang berfungsi untuk memberikan informasi perkara, yang memungkinkan masyarakat, termasuk pihak yang berperkara, untuk mengakses informasi terkait perkembangan suatu perkara secara online: rusak (tidak dapat diakses).

Walhasil, sejumlah keluarga dari yang berperkara di PN Medan kesusahan untuk mencari tahu perkembangan perkara.

"Biasanya kita bisa melihat dari SIPP, kapan harinya, jamnya kapan. Bisa juga lihat kronologis peristiwanya. Tapi sekarang tidak bisa,

sudah se minggu," kata Serik kepada wartawan, Kamis (3/7/2025).

Warga Medan Timur itu berharap PN Medan segera memperbaiki SIPP PN Medan yang dinilai dapat membantu pelayanan publik untuk mencari keadilan.

"Inikan pelayanan untuk masyarakat, harusnya diperhatikan. Tapi SIPP PN Medan sering kali rusak gini, jadi saya berharap segera lah diperbaiki," ungkapnya.

Juru Bicara (Jubir) PN Negeri Medan Sonia-dy, Kamis (3/7/2025), kepada Mimbar Umum, mengaku sedang adanya perbaikan.

"Iya bang, beberapa hari ini masih dalam

perbaikan. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya," tutur Jubir PN Medan.

Sebelumnya di masa

Ketua PN Medan Jon Sarman Saragih berhasil meraih prestasi, yakni pencapaian Evaluasi Implementasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (EIS) untuk Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus.

Tepat 20 Juni 2025 terjadi transisi kepemimpinan kepada Mardison menjabat sebagai Ketua Pengadilan Negeri (PN) Medan menggantikan Jon Sarman Saragih yang mendapatkan promosi jabatan menjadi Hakim Pengadilan Tinggi Palembang. (A-08)



RI Kutuk Israel

Dari Halaman 1

dr. Marwan Al Sultan, Direktur RS Indonesia di Gaza, beserta keluarganya pada tanggal 2 Juli 2025 dan mengungkap serangan Israel tersebut," demikian pernyataan Kemlu RI.

Lebih lanjut, Kemlu RI menyatakan Indonesia mengapresiasi jasa, komitmen dan perjuangan Al Sultan bagi kemanusiaan dan perdamaian di Palestina. RI juga terus memonitor dari dekat perkembangan RS Indonesia di Gaza.

"Indonesia kembali menyerukan dihentikannya kekejaman Israel dan dilakukannya gencatan senjata segera di Palestina," imbuh Kemlu.

Al Sultan dan keluarganya tewas dalam serangan brutal Israel di Gaza.

Sumber Al Jazeera mengatakan, serangan Israel menargetkan bangunan perumahan di Barat Daya Kota Gaza. Istri dan anak Al Sultan, lanjut dia, tewas dalam gempuran itu.

Al-Sultan merupakan sumber informasi utama dari Gaza, yang melaporkan kondisi warga Palestina kepada publik.

Ia juga sudah berulang kali meminta masyarakat internasional memastikan keselamatan tim medis termasuk saat Israel menyerang hingga menyerang secara brutal RS Indonesia.

Israel melancarkan agresi ke Palestina pada Oktober 2023. Sejak saat itu, mereka menggempur habis-habisan fasilitas sipil seperti rumah sakit, kamp pengungsian, hingga tempat ibadah.

Selama agresi, Israel berulang kali mengepung dan menyerang RS Indonesia. Mereka menuding ada markas Hamas di fasilitas medis tersebut sehingga perlu dihancurkan.

Tuduhan Israel tak pernah terbukti. Mereka sering menggunakan dalih yang sama untuk menyerang dan menggempur fasilitas medis di Gaza.

Imbas agresi Israel, lebih dari 56.000 warga di Palestina meninggal, ratusan ribu rumah hancur, dan ratusan fasilitas sipil porak-poranda. (cnni/js)



Jejak Digital Bukti Baru Kekuasaan

Dari Halaman 1

Publik tentu bertanya-tanya: apakah komunikasi itu sebatas urusan teknis atau menyimpan potensi intervensi politik? Di sinilah pentingnya transparansi dan kejujuran dalam jabatan publik. Jika ditemukan bukti bahwa komunikasi mengarah pada pengaturan proyek, pengondisian anggaran, atau pembagian keuntungan, maka kasus ini bisa meluas dan mengungkap jaring kekuasaan yang lebih besar.

Keterlibatan Bobby, jika terbukti, akan menjadi contoh nyata kegagalan integritas pejabat publik yang selama ini dielu-elukan sebagai "pemimpin muda harapan bangsa". Nama Bobby selama ini identik dengan citra milenial, modern, dan mewarisi semangat antikorupsi dari sang mertua. Namun realitas politik daerah membuktikan bahwa jabatan bukan sekadar soal usia muda, melainkan sejauh mana seseorang mampu menjaga jarak dari konflik kepentingan.

Relasi antara Bobby dan Topan—jika didukung data digital intensif—harus dilihat bukan hanya secara hukum, tetapi juga secara etika pemerintahan. Apakah Bobby memberi arahan khusus? Apakah ada tekanan atau sinyal politik terhadap penunjukan pemenang proyek? Dan yang lebih penting: apakah Bobby menutup mata atas praktik suap yang berjalan di bawahnya?

Etika jabatan menuntut seorang pemimpin untuk tidak sekadar bersih, tapi juga menjauhkan diri dari segala praktik yang menimbulkan persepsi negatif. Apalagi dalam posisi sebagai menantu Presiden, Bobby bukan figur biasa. Ia harus memahami bahwa standar etik yang melekat padanya jauh lebih tinggi dibanding pejabat daerah biasa.

KPK harus mengambil momen ini untuk membuktikan bahwa lembaga antirasuah tetap bertaji meski diterpa revisi UU dan pelembahan kelembagaan. Dengan menelusuri jejak digital Bobby secara objektif dan profesional, KPK bisa mengembalikan kepercayaan publik yang mulai goyah. Terlalu banyak kasus besar yang berhenti di level bawah dan tak pernah menyentuh elite politik.

Jika KPK menemukan keterlibatan Bobby, lembaga ini harus berani memanggil dan, bila perlu, menetapkan status hukum tanpa memandang status keluarga, jabatan, atau afiliasi politik. Keadilan tidak boleh kalah oleh kekuasaan. Inilah waktu terbaik KPK membuktikan bahwa hukum tetap bekerja dalam sunyi, bahkan ketika menyentuh lingkaran istana.

Saat ini Bobby menyatakan siap diperiksa dan kooperatif. Pernyataan itu patut diapresiasi. Tapi lebih dari itu, publik ingin melihat tindakan nyata: transparansi, penjelasan terbuka, dan keberanian mengambil tanggung jawab jika memang terbukti ada kesalahan atau kelalaian.

Jika Bobby merasa tidak terlibat, maka ini saatnya membersihkan namanya dengan cara elegan—bukan dengan membangun opini di media, tapi dengan memberi ruang sepenuhnya kepada proses hukum bekerja.

Skandal ini adalah potret kecil dari persoalan besar yang mengakar di pemerintahan daerah: proyek infrastruktur yang dibajak oleh kepentingan politik dan elite lokal. Kasus ini bukan hanya tentang suap proyek jalan, tapi juga tentang arah pemerintahan dan integritas demokrasi lokal kita.

Kita patut mengawal KPK agar tetap berani menelusuri setiap jejak digital kekuasaan, tanpa takut pada nama besar atau jaringan politik yang menyertainya. Hukum tidak boleh tumpul ke atas. Dan keadilan harus menjadi milik semua, bukan hanya mereka yang lemah.